

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio kondisi keuangan pemerintah daerah di kota Palembang selama kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan model enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari LHP LKPD Kota Palembang selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Berikut kesimpulan terkait penelitian yang dapat diambil:

1. Kesimpulan atas nilai rasio kondisi keuangan pemerintah daerah kota Palembang:

a. Solvabilitas jangka pendek:

Nilai rasio solvabilitas jangka pendek pemerintah daerah kota Palembang berfluktuasi. Kemudian, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kota Palembang memiliki solvabilitas jangka pendek yang baik, karena memiliki aset lancar yang cukup untuk menjamin kewajiban lancarnya.

b. Solvabilitas jangka panjang:

Nilai rasio solvabilitas jangka panjang pemerintah daerah kota Palembang berfluktuasi. Kemudian, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kota Palembang memiliki solvabilitas jangka panjang yang baik karena memiliki jumlah aset yang cukup untuk menjamin kewajiban jangka panjangnya.

c. Solvabilitas anggaran:

Nilai rasio solvabilitas anggaran pemerintah daerah kota Palembang berfluktuasi. Kemudian, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kota Palembang memiliki solvabilitas anggaran yang baik, karena memiliki jumlah pendapatan yang cukup untuk digunakan dalam membiayai belanja operasionalnya.

d. Kemandirian keuangan:

Nilai rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah kota Palembang berfluktuasi. Kemudian, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kota Palembang memiliki kemandirian keuangan yang masuk ke kategori sedang, karena masih bergantung pada sumber pendanaan di luar kendali atau di luar pengaruh mereka.

e. Fleksibilitas keuangan:

Nilai rasio fleksibilitas keuangan pemerintah daerah kota Palembang berfluktuasi. Kemudian, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kota Palembang memiliki fleksibilitas keuangan yang baik, karena memiliki jumlah kapasitas pendapatan (setelah dikurangi belanja-wajib dan pendapatan terikat) yang lebih besar dibandingkan kapasitas utang.

f. Solvabilitas layanan:

Nilai rasio solvabilitas layanan pemerintah daerah kota Palembang berfluktuasi. Kemudian, tidak dapat dikatakan apakah nilai rasio solvabilitas layanan pemerintah daerah kota Palembang sudah dalam kadar baik ataukah belum. Hal ini dikarenakan, belum adanya batasan jelas yang dapat membedakan kondisi solvabilitas layanan yang baik dan kurang baik. Akan tetapi, semakin besar nilai solvabilitas layanan maka semakin baik pula kondisi solvabilitas layanan di pemda tersebut.

2. Berdasarkan perhitungan atas Indeks Komposit Kondisi Keuangan (IKK) yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa selama tahun 2016 sampai tahun 2020 maka kondisi keuangan pemerintah daerah kota Palembang yang terbaik berada pada tahun 2017 dengan kategori "Baik" dan diikuti dengan tahun 2020, 2019, 2018, dan 2016 dengan kategori "Cukup".

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Walaupun dapat dikatakan bahwa berdasarkan keenam dimensi rasio kondisi keuangan yang dikembangkan oleh Ritonga (2014) selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kondisi keuangan pemerintah daerah kota Palembang mendapatkan predikat baik kecuali pada rasio kemandirian keuangan dan solvabilitas layanan, akan tetapi sebaiknya pemerintah daerah kota Palembang dapat terus memperhatikan pertumbuhan dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan belanjanya agar dapat memperoleh nilai rasio kondisi keuangan yang lebih baik lagi. Karena, jika diperhatikan maka akan didapati bahwa nilai-nilai rasio kondisi keuangan di pemerintah daerah kota Palembang mendapatkan nilai yang hanya memadai untuk dapat dikatakan baik. Kemudian, berdasarkan nilai rasio kemandirian keuangan sebaiknya pemerintah daerah kota Palembang dapat lebih meningkatkan pendapatan dari eksplorasi sumber pendanaan baru dan lebih mengoptimalkan aktivitas ekonomi dari sektor-sektor potensial di kota Palembang seperti contohnya industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Selanjutnya, berdasarkan nilai solvabilitas layanan pemerintah daerah kota Palembang perlu menjaga kestabilan dari pertumbuhan penduduk dan inflasi untuk menjaga agar nilai rasio solvabilitas layanan ini tetap tumbuh positif.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ke ranah yang lebih luas, seperti membandingkan antara suatu kota dengan kota lainnya atau bahkan provinsi satu dengan provinsi lainnya. Kemudian melakukan pemeringkatan antar suatu daerah yang telah diteliti.